



Workshop Layanan Digital Pajak: Panduan Praktis Membuat NPWP Mandiri di Kelurahan Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang

**RISKA ANTIKA RAHMAN^{1a}, AMINAH^{1b}, BUNGA FITRIA SUKMA^{1c}
YOSEPH BOROMEUS BABUR^{1d}, DIAN WIDIYATI^{1e}**

**¹Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
*Email: Riskaantika32@gmail.com**

Abstract

In the midst of the government's efforts to simplify the tax system, other challenges have emerged, especially related to people's digital literacy. There are still many people who are not used to using digital technology to fulfill their tax obligations, including registering for NPWP online through the DGT portal. This Community Service is carried out and shown to MSME actor partners in order to support the development of the application of Accounting Science. Especially in understanding the importance of the Taxpayer Identification Number (NPWP), its benefits, and how to register independently through the DGT Online portal. Taxpayers no longer need to have a separate tax identity number, thus reducing the risk of data errors or duplication. This activity also provides information related to the policy of matching the Population Identification Number (NIK) into NPWP in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022. Showing an increase in participants' understanding of the importance of NPWP and its registration steps. Participants responded positively to interactive delivery methods and supported by visual media such as presentation slides and video tutorials. An integrated system helps encourage taxpayers to more easily carry out their obligations, such as reporting and paying taxes. Through this activity, taxpayers are expected to be able to utilize technology to support better and efficient tax governance and have a significant impact by increasing public compliance with tax obligations can be categorized as successful in increasing participants' awareness and understanding of the importance of NPWP, although there is still room for improvement in future implementation.

Keywords: *Tax Literacy, NPWP, NIK-NPWP Matching, DGT Online, Tax Workshop.*

Abstrak

Di tengah upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem perpajakan, tantangan lain muncul, terutama terkait dengan literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui portal DJP. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dan ditunjukkan



kepada mitra pelaku UMKM dalam rangka mendukung pengembangan penerapan Ilmu Akuntansi. Khususnya dalam memahami pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), manfaatnya, serta cara pendaftarannya secara mandiri melalui portal *DJP Online*. Wajib Pajak tidak perlu lagi memiliki nomor identitas perpajakan yang terpisah, sehingga mengurangi risiko kesalahan data atau duplikasi. Kegiatan ini juga memberikan informasi terkait kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya NPWP dan langkah-langkah pendaftarannya. Peserta merespons positif metode penyampaian yang interaktif dan didukung media visual seperti *slide* presentasi dan video tutorial. Sistem yang terintegrasi membantu mendorong Wajib Pajak untuk lebih mudah melaksanakan kewajibannya, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui kegiatan ini, Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih baik dan efisien dan memberikan dampak signifikan dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat dikategorikan sebagai berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pentingnya NPWP, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada pelaksanaan di masa mendatang.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan, NPWP, Pemadanan NIK-NPWP, *DJP Online*, Workshop Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang diwajibkan bagi setiap individu atau badan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Kepemilikan NPWP memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memperoleh layanan administrasi perpajakan, hingga akses terhadap berbagai program pemerintah. NPWP juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya mendukung optimalisasi penerimaan negara. Sebagai langkah awal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan memiliki NPWP, baik untuk pelaporan, penyetoran, maupun pemotongan pajak. Dengan memiliki NPWP, masyarakat tidak hanya dapat melaksanakan kewajibannya, tetapi juga dapat memperoleh hak-haknya sebagai Wajib Pajak, seperti pengurangan tarif pajak tertentu dan perlindungan hukum perpajakan. Namun, meskipun manfaat NPWP begitu besar, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memiliki NPWP atau bahkan tidak mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Dalam rangka menyederhanakan proses administrasi perpajakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, yang mengharuskan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Dengan kebijakan ini,



masyarakat yang sudah memiliki NIK secara otomatis dapat menggunakan nomor tersebut sebagai pengganti NPWP, tanpa perlu mendaftarkan nomor baru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan data, dan mendukung integrasi sistem antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurut Tjandra Wasesa dkk. dalam artikel "Pentingnya Pemadanan NIK–NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta Tata Cara Validasinya," pemadanan ini membawa beberapa manfaat penting, di antaranya:

1. Kemudahan Identifikasi

Dengan menggunakan NIK, sistem perpajakan dapat langsung mengakses data Wajib Pajak yang terhubung dengan Dukcapil, sehingga mempercepat proses administrasi.

2. Efisiensi Administrasi

Wajib Pajak tidak perlu lagi memiliki nomor identitas perpajakan yang terpisah, sehingga mengurangi risiko kesalahan data atau duplikasi.

3. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Sistem yang terintegrasi membantu mendorong Wajib Pajak untuk lebih mudah melaksanakan kewajibannya, seperti pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun, di tengah upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem perpajakan, tantangan lain muncul, terutama terkait dengan literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui portal DJP. Kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan praktis juga menjadi hambatan utama, sehingga beberapa kelompok masyarakat tidak mengetahui proses pendaftaran NPWP maupun langkah-langkah pemadanan NIK-NPWP.

Untuk menjawab tantangan ini, Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pamulang melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melaksanakan *workshop* "Mudahnya Buat NPWP Sendiri Lewat Website DJP." Workshop ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat Kelurahan Kadu Agung tentang pentingnya NPWP serta cara mendaftarkan diri secara mandiri melalui portal DJP Online. Selain itu, kegiatan ini juga menyampaikan informasi terkini mengenai pemadanan NIK-NPWP sesuai ketentuan PMK, sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah validasi data perpajakan mereka. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, workshop ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi terkait perpajakan, meningkatkan literasi digital, serta mendorong masyarakat untuk menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan ini, Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih baik dan efisien (Muhajir, S. N. 2022).

Berdasarkan hasil pra survei yang kami lakukan di Kelurahan Kadu Agung Kec Tigaraksa Tangerang tentang NPWP terdapat data memiliki dan tidak memiliki (tidak mengetahui) pelaku UMKM tersebut.



Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Memiliki NPWP	20	55%
Tidak Memiliki NPWP	16	45%
Total	36	100%

Sumber : Data Survey, 2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban perpajakan, khususnya pada pengenalan dan pendaftaran NPWP. Dengan elemen-elemen sebagai berikut :

Konsep Dasar dan Pentingnya NPWP

NPWP merupakan identitas resmi untuk Wajib Pajak yang memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi administrasi perpajakan, pengurangan risiko kesalahan data, dan akses ke berbagai program pemerintah. Penerapan NPWP mendukung kepatuhan perpajakan, yang berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara (Wasesa et al., 2022).

Pemadanan NIK-NPWP sebagai Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemadanan NIK-NPWP diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan mengintegrasikan data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Dukcapil. Manfaat utama kebijakan ini meliputi kemudahan identifikasi Wajib Pajak, efisiensi administrasi, dan peningkatan kepatuhan perpajakan (Tjandra Wasesa et al., 2023).

Tantangan Literasi Digital dalam Perpajakan

Meskipun upaya digitalisasi telah dilakukan, literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan utama, khususnya dalam penggunaan portal DJP Online untuk mendaftar NPWP. Keterbatasan akses teknologi, seperti perangkat digital dan koneksi internet, serta rendahnya kemampuan mengoperasikan teknologi, menjadi isu yang sering ditemui dalam kegiatan literasi digital (Nurhayati, 2021).

Pendekatan dan Metode Pelatihan untuk Literasi Digital Perpajakan

Pelatihan berbasis partisipasi dan simulasi langsung terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses digital, termasuk pendaftaran NPWP. Media visual seperti presentasi, video tutorial, dan diagram alur membantu mempermudah peserta dalam memahami proses tersebut (Nurmalina et al., 2022). Sesi tanya jawab dan simulasi langkah-langkah teknis memperkuat kepercayaan diri peserta untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Muhajir, 2022).



3. METODE

Pendekatan partisipatif, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan simulasi langsung. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa peserta memahami materi sekaligus mampu menerapkannya dalam proses pendaftaran NPWP secara mandiri. Sebagaimana diungkapkan oleh dalam “jurnal Literasi Digital untuk Pembangunan”, metode pelatihan berbasis partisipasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan peserta untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Narasumber menyampaikan informasi terkait dasar-dasar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pentingnya kepemilikan NPWP, dan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Penyampaian materi dilakukan dengan gaya komunikatif dan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta yang memiliki latar belakang beragam. Penjelasan mencakup:
 - a. Dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran, seperti KTP elektronik dan alamat email aktif.
 - b. Langkah-langkah registrasi melalui portal DJP Online, mulai dari pembuatan akun hingga validasi data.
 - c. Informasi tambahan tentang kebijakan terbaru terkait pemadanan NIK-NPWP.

Penyampaian materi didukung oleh media visual seperti presentasi slide, diagram alur, dan video tutorial singkat untuk memperjelas tahapan proses. Menurut Muhajir (2021). dalam “Jurnal Literasi Digital : Sebuah Kajian Pengabdian kepada Masyarakat”, alat bantu visual seperti diagram dan video sangat efektif untuk membantu peserta memahami alur proses berbasis teknologi.

2. Simulasi Langsung

Peserta diajak untuk mencoba proses pendaftaran NPWP secara langsung dengan bimbingan fasilitator. Panitia menyediakan perangkat digital seperti laptop dan koneksi internet yang digunakan secara bergantian. Tahapan simulasi mencakup:

- a. Membuka portal DJP Online.
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi.
- c. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan.
- d. Melakukan validasi awal untuk memperoleh nomor pendaftaran.

Simulasi ini bertujuan untuk memastikan peserta memahami langkah-langkah teknis yang diperlukan. Pendekatan praktis seperti ini, Menurut Nurhayati, S., Masri, A., & Falah, N. (2020), dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta dalam memanfaatkan teknologi baru.

3. Sesi Tanya Jawab

Setelah simulasi, narasumber membuka sesi tanya jawab untuk membahas kendala yang mungkin dihadapi peserta selama proses pendaftaran. Pertanyaan yang sering diajukan meliputi:

- a. Apa yang harus dilakukan jika dokumen pendaftaran tidak valid?
- b. Bagaimana cara memperbarui data NPWP jika terjadi perubahan informasi



pribadi?

- c. Apa langkah-langkah untuk memadankan NIK dengan NPWP?
Dalam sesi ini, narasumber memberikan jawaban yang rinci dan berbasis pada kebijakan terkini, disertai dengan tips praktis untuk membantu peserta menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi setelah kegiatan workshop. Kami merancang usulan solusi pemecahan permasalahan tersebut dengan menguraikannya sebagai berikut:

Tabel 1. Pemecahan Masalah

Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan
Kurangnya pemahaman tentang pentingnya NPWP	Mengadakan sosialisasi tentang manfaat NPWP, seperti akses program pemerintah, keringanan pajak, dan perlindungan hukum.
Tidak mengetahui cara pendaftaran NPWP	Mengadakan pelatihan langsung (workshop) tentang pendaftaran NPWP melalui portal DJP Online dengan simulasi langkah-langkah.
Literasi digital rendah	Memberikan panduan praktis berupa video tutorial, brosur, atau modul yang dapat dipelajari secara mandiri.
Kendala akses teknologi, seperti tidak memiliki perangkat digital	Menyediakan fasilitas komputer/laptop dan koneksi internet selama pelatihan untuk mendukung simulasi pendaftaran.
Ketidaksiapan dokumen pendaftaran	Menginformasikan dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan pelatihan, seperti KTP elektronik dan alamat email aktif.
Keengganan untuk melaksanakan kewajiban pajak	Meningkatkan kesadaran dengan menjelaskan dampak positif kepatuhan pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama.

4. DISKUSI

Kegiatan workshop ini memberikan hasil positif bagi peserta, dengan beberapa pencapaian sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman
Seluruh peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya NPWP dan langkah-langkah pendaftarannya. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka untuk menjelaskan ulang proses pendaftaran melalui portal DJP Online, termasuk dokumen yang diperlukan, tahapan pengisian data, hingga langkah validasi awal. Peningkatan pemahaman ini tidak terlepas dari metode penyampaian materi yang interaktif dan didukung oleh alat bantu visual seperti presentasi slide dan video tutorial. Menurut Nurmalina, R., et al. (2022) dalam Jurnal Literasi Digital untuk Pembangunan, penggunaan media visual efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap teknologi baru.
2. Respon Positif terhadap Materi
Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan memberikan wawasan baru dan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk



mencoba pendaftaran NPWP secara mandiri di rumah. Narasumber berhasil menciptakan suasana pelatihan yang komunikatif, sehingga peserta merasa lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan.

Kendala yang ditemui

Semua tabel dan gambar yang anda masukkan dalam dokumen harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau Walaupun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan serupa di masa mendatang:

1. **Keterbatasan Akses Teknologi**
Tidak semua peserta memiliki perangkat digital yang memadai, seperti laptop atau *smartphone*, untuk mencoba langsung langkah-langkah pendaftaran. Hal ini sesuai dengan temuan Muhajir (2021) dalam Jurnal Literasi Digital “Sebuah Kajian Pengabdian kepada Masyarakat”, yang menyebutkan bahwa keterbatasan akses teknologi merupakan hambatan utama dalam implementasi literasi digital di masyarakat pedesaan.
2. **Literasi Digital yang Rendah**
Beberapa peserta mengaku merasa canggung untuk menggunakan teknologi digital, terutama saat membayangkan proses unggah dokumen atau pengisian data secara online. Menurut Sri Nurhayati dalam “Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)”, keterbatasan literasi digital sering menjadi kendala utama dalam memanfaatkan layanan digital baru.
3. **Kurangnya Informasi Awal**
Sebagian peserta datang tanpa membawa dokumen lengkap, seperti KTP elektronik atau alamat email aktif, yang diperlukan untuk simulasi pendaftaran. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih terarah sebelum pelaksanaan workshop.

Evaluasi dan Feedback Peserta

Kepuasan peserta dari umpan balik yang diberikan, mayoritas peserta menyatakan puas dengan kegiatan ini. Mereka merasa bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, terutama karena didukung dengan penjelasan yang sistematis dan contoh praktis. Saran dan Rekomendasi Peserta memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan, Pelatihan lanjutan tentang kewajiban perpajakan lainnya Peserta berharap adanya sesi khusus untuk membahas pelaporan pajak tahunan dan penggunaan layanan DJP Online lainnya. Penyediaan materi cetak atau video tutorial Untuk mendukung pembelajaran mandiri di rumah, peserta mengusulkan adanya panduan tertulis atau digital. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam Jurnal Literasi Digital, yang menyebutkan bahwa materi pembelajaran mandiri dapat membantu memperkuat hasil pelatihan (Nurhayati, S. 2021).

5. KESIMPULAN

Workshop "Mudahnya Buat NPWP Sendiri Lewat Website DJP" telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan literasi perpajakan masyarakat



Kelurahan Kadu Agung. Melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), manfaatnya dalam mendukung kewajiban perpajakan, serta langkah-langkah pendaftarannya melalui portal DJP Online. Salah satu keberhasilan utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta tentang peran penting NPWP, tidak hanya sebagai identitas perpajakan, tetapi juga sebagai akses untuk mendapatkan layanan administrasi perpajakan yang lebih baik. Dengan adanya materi tentang pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP sesuai kebijakan terbaru, peserta juga menjadi lebih memahami integrasi sistem perpajakan dengan data kependudukan yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain pemahaman konsep, metode penyampaian materi yang didukung dengan alat bantu visual seperti presentasi slide, video tutorial, dan diagram alur telah memberikan pengalaman belajar yang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam berbagai penelitian, seperti yang disebutkan oleh Nurmawati et al. (2022), bahwa media visual sangat efektif dalam mempercepat transfer pengetahuan di era digital. Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan peserta, beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan memberikan catatan penting untuk perbaikan di masa depan. Keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang rendah menjadi tantangan yang perlu diatasi, khususnya untuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan platform digital. Selain itu, kurangnya persiapan dokumen oleh sebagian peserta menunjukkan perlunya informasi yang lebih terarah sebelum pelaksanaan kegiatan serupa. Peserta juga memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kegiatan ini di masa mendatang, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang berfokus pada kewajiban perpajakan lainnya, seperti pelaporan pajak tahunan.
2. Menyediakan modul atau panduan pembelajaran berbasis cetak maupun digital agar peserta dapat mengakses kembali informasi yang telah disampaikan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak signifikan dalam menjembatani kesenjangan informasi perpajakan di masyarakat. Program ini menjadi salah satu wujud nyata kontribusi Universitas Pamulang dalam mendukung tata kelola perpajakan yang lebih efisien melalui pemberdayaan masyarakat di era digital. Dengan keberlanjutan dan pengembangan program yang tepat, diharapkan masyarakat semakin siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara mandiri dan patuh sesuai regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhajir, S. N. (2022). Literasi Digital: Sebuah Kajian Pengabdian kepada Masyarakat. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 110. <https://doi.org/10.52434/jpm.v1i3.2247>
- Muhajir. (2021). *Jurnal Literasi Digital: Sebuah Kajian Pengabdian kepada Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 12(3), 67-76.



- Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202.
<https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Nurhayati, S. (2021). *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 14(2), 123-135.
- Nurhayati, S., Masri, A., & Falah, N. (2020). Implementasi Workshop Literasi Digital dalam Membangun Keberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(3), 348–359.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/2457>
- Nurmalina, R., et al. (2022). *Jurnal Literasi Digital untuk Pembangunan*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan, 15(1), 89-101.
- Nurmalina, N., Rahila, C. D. I., Surbakti, A. H., Wahyuningsih, S. K., & Batubara, M. H. (2022). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Canva Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(2), 48–53.
<https://doi.org/10.37249/jpma.v2i2.532>
- Tjandra Wasesa, et al. (2022). *Pentingnya Pemadanan NIK–NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta Tata Cara Validasinya*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 17(1), 45-59.
- Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *Akuntansi* 45, 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Pemadanan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak.